



RENCANA
KERJA 2026

INSPEKTORAT
KABUPATEN KUTAI TIMUR



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029 dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Renja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang

Sangatta, 2025
Plt. Inspektur
Kabupaten Kutai Timur

Dr. Drs. H. Sudirman Latif, SH., M.Si
NIP. 19651212 200003 1 003

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II | 5 |
| EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2025 | 5 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 | 5 |
| 2.2 Evaluasi Capaian Kinerja dan Target Renja Tahun 2025 | 13 |
| 2.3 Permasalahan dan Hambatan Pelaksanaan Renja Tahun 2025 | 14 |
| 2.4 Isu Strategis Berdasarkan Evaluasi Renja Tahun 2025 | 14 |
| 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 15 |
| BAB III | 24 |
| TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 | 24 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 24 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah | 24 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 25 |
| BAB IV | 29 |
| RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026 | 29 |
| BAB V | 35 |
| PENUTUP | 35 |

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kab. Kutai Timur dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**
- Tabel 2.2 Hasil Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024**
- Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Inspektorat Kabupaten Kutai Timur**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029. Renja ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan internal pada Tahun Anggaran 2026 secara terarah, terukur, dan akuntabel.

Penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2026 dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan, sehingga sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat dicapai secara bertahap dan konsisten. Renja juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja, serta sebagai dasar dalam penyusunan anggaran melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat.

Renja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional, antara lain:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2045;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029;
- Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026;
- Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten Kutai Timur memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan, serta pemberian jasa konsultasi kepada perangkat daerah guna mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029;
9. Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pengawasan internal pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, agar pelaksanaannya lebih terarah, terkoordinasi, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 adalah:

1. Menjamin keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan program dan kegiatan Inspektorat;
2. Menjabarkan sasaran, indikator, dan target kinerja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur yang akan dicapai pada Tahun 2026;
3. Menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026;
4. Meningkatkan kualitas pengawasan internal dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025
- 2.2 Evaluasi Capaian Kinerja dan Target Renja Tahun 2025
- 2.3 Permasalahan dan Hambatan Pelaksanaan Renja Tahun 2025
- 2.4 Isu Strategis Berdasarkan Evaluasi Renja Tahun 2025
- 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan baik dan mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029. Program dan kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka menjamin akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Program pengawasan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, Inspektorat juga melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan berupa pembinaan SPIP, evaluasi reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparatur pengawasan.

Secara umum, capaian indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat menunjukkan tren positif, antara lain meningkatnya persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan, capaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), nilai SAKIP Inspektorat, serta indeks integritas dan profesionalisme aparatur. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Renja Tahun 2025 telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya belum optimal sepenuhnya, terutama yang berkaitan dengan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya pengawasan, sehingga memerlukan perhatian dan perbaikan pada perencanaan Tahun 2026.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kab. Kutai Timur dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja SKPD (Akhir Periode Renstra 2021- 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Tahun 2025 | |
|------|---|--|--|---|--|-----------|-----------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah | | 96 | 100 | 96 | 96 | 100 | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | | |

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja SKPD (Akhir Periode Renstra 2021- 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Tahun 2025 | |
|------|---|--|--|---|--|-----------|-----------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah | | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 78 | 80 | 78 | 97,5 | 80 | | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 12 | 19 | 12 | 63,16 | 19 | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 5 | 15 | 5 | 33,33 | 15 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | | |

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja SKPD (Akhir Periode Renstra 2021- 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Tahun 2025 | |
|------|--|---|--|---|--|-----------|-----------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | 105 | 105 | 105 | 100 | 105 | | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | 105 | 105 | 105 | 100 | 105 | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 6 | 6 | 6 | 100 | 6 | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 4 | 5 | 4 | 80 | 5 | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | | |

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja SKPD (Akhir Periode Renstra 2021- 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Tahun 2025 | |
|------|--|--|--|---|--|-----------|-----------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | | |

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja SKPD (Akhir Periode Renstra 2021- 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Tahun 2025 | |
|------|---|--|--|---|--|-----------|-----------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | 1 | 2 | 1 | 50 | 2 | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Jumlah Temuan BPK | | 21 | 16 | 21 | 68,75 | 16 | | |
| | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Pengawasan Internal Pemerintah | | 47 | 55 | 47 | 85,45 | 55 | | |
| | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | 54 | 54 | 54 | 100 | 54 | | |
| | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | 24 | 24 | 24 | 100 | 24 | | |
| | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | | 15 | 15 | 15 | 100 | 15 | | |
| | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | | 19 | 19 | 19 | 100 | 19 | | |
| | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | | 53 | 53 | 53 | 100 | 53 | | |
| | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | | |

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja SKPD (Akhir Periode Renstra 2021- 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Tahun 2025 | |
|------|---|--|--|---|--|-----------|-----------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Ditindak Lanjuti | | 81 | 90 | 81 | 90 | 90 | | |
| | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | | |
| | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | 24 | 24 | 24 | 100 | 24 | | |
| | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Cakupan Pengaduan OPD dan Masyarakat yang ditindaklanjuti | | 60 | 60 | 60 | 100 | 60 | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dihasilkan | | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | | 2 | 3 | 2 | 66,67 | 3 | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | | |
| | Pendampingan dan Asistensi | Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi | | 4 | 56 | 4 | 7,14 | 56 | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja SKPD (Akhir Periode Renstra 2021- 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Tahun 2025 | |
|------|---|---|--|---|--|-----------|-----------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | | |
| | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |

2.2 Evaluasi Capaian Kinerja dan Target Renja Tahun 2025

Evaluasi capaian kinerja Renja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang direncanakan.

Capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Adanya komitmen pimpinan dan dukungan kebijakan daerah terhadap penguatan fungsi pengawasan;
2. Meningkatnya koordinasi dan sinergi antara Inspektorat dengan perangkat daerah;
3. Pendampingan dan pembinaan dari APIP tingkat provinsi dan BPKP;
4. Perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya capaian kinerja pada sebagian kegiatan, seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengawasan, kompleksitas objek pemeriksaan, serta rendahnya respons dan komitmen sebagian perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.

Tabel 2.2

Hasil Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

| NO | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN 2024 | | | STATUS |
|----|--|---------------|---------------|-----|-------------|
| | | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP | WTP | 100 | Sangat Baik |
| 2 | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 70% | 81 % | 100 | Sangat Baik |
| 3 | Persentase kasus KKN dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti | 70% | 70% | 100 | Sangat Baik |
| 4 | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 2 Rekomendasi | 2 Rekomendasi | 100 | Sangat Baik |

| | | | | | |
|----|--|----------|----------|-----|---------------|
| 5 | Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori B. | 6 OPD | 0 OPD | 0 | Sangat Rendah |
| 6 | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP. | 65% | 17 % | 26 | Sangat Rendah |
| 7 | Maturitas SPIP Pemda | Level 3 | Level 3 | 100 | Sangat Baik |
| 8 | Aparatur Pengawasan yang bersertifikat | 50 Orang | 53 Orang | 100 | Sangat Baik |
| 9 | Level Kapabilitas APIP Inspektorat | Level 3 | Level 3 | 100 | Sangat Baik |
| 10 | Persentase pelanggaran disiplin pegawai yang ditindaklanjuti | 90% | 100 % | 100 | Sangat Baik |

2.3 Permasalahan dan Hambatan Pelaksanaan Renja Tahun 2025

Dalam pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan, antara lain:

1. Masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti secara tepat waktu oleh perangkat daerah;
2. Kapasitas dan jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang belum sepenuhnya sebanding dengan luas dan kompleksitas objek pengawasan;
3. Tingkat pemahaman perangkat daerah terhadap pengelolaan risiko dan penerapan SPIP yang masih bervariasi;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengawasan, terutama kendaraan operasional dan perangkat teknologi informasi;
5. Dinamika regulasi dan kebijakan yang memerlukan penyesuaian cepat dalam pelaksanaan pengawasan.

Permasalahan tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 agar perencanaan program dan kegiatan pengawasan dapat lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap kebutuhan daerah.

2.4 Isu Strategis Berdasarkan Evaluasi Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2026, yaitu:

1. Penguatan peran APIP sebagai penjamin mutu (quality assurance) dan pemberi konsultasi (consulting) bagi perangkat daerah;
2. Peningkatan kualitas pengawasan berbasis risiko untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah;
3. Percepatan dan peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;
4. Peningkatan kapabilitas APIP melalui pengembangan kompetensi, sertifikasi, dan pemenuhan kebutuhan SDM pengawasan;
5. Penguatan integritas, pencegahan korupsi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Kutai Timur pada Renja Tahun 2026, agar fungsi pengawasan dapat memberikan nilai tambah (value added) bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan.

Berikut digambarkan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI TIMUR

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|---|-------------|--|----------------|-------------------------|---|-------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kutai Timur | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dok | 209.830 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kutai Timur | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dok | 209.830 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kutai Timur | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 200.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kutai Timur | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 200.000 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | Kutai Timur | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | 3 Dok | 200.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | Kutai Timur | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | 3 Dok | 200.000 | |

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|---|-------------|--|-----------------|-------------------------|---|-------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kutai Timur | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 135 orang/bulan | 15.167.539 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kutai Timur | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 135 orang/bulan | 15.167.539 | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kutai Timur | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 4 Dok | 250.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kutai Timur | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 4 Dok | 250.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kutai Timur | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 125.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kutai Timur | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 125.000 | |
| Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kutai Timur | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 Laporan | 150.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kutai Timur | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 Laporan | 150.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|---|-------------|---|----------------|-------------------------|---|-------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Kutai Timur | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 2 Unit | 190.000 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Kutai Timur | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 2 Unit | 190.000 | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kutai Timur | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 250 org | 3.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kutai Timur | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 250 org | 3.000.000 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kutai Timur | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | 300.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kutai Timur | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | 300.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kutai Timur | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 160 Laporan | 750.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kutai Timur | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 160 Laporan | 750.000 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | |

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|--|-------------|--|----------------|-------------------------|--|-------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kutai Timur | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 10 unit | 684.000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kutai Timur | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 10 unit | 684.000 | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kutai Timur | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 30 unit | 100.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kutai Timur | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 30 unit | 100.000 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kutai Timur | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 300.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kutai Timur | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 300.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kutai Timur | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 300.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kutai Timur | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 300.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|-------------|--|----------------|-------------------------|---|-------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kutai Timur | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 50 unit | 350.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kutai Timur | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 50 unit | 350.000 | |
| | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Kutai Timur | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 100 unit | 300.000 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Kutai Timur | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 100 unit | 300.000 | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | | | | | | | |
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Kutai Timur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 74 Laporan | 2.000.000 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Kutai Timur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 74 Laporan | 2.000.000 | |
| | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Kutai Timur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 94 Laporan | 2.000.000 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Kutai Timur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 94 Laporan | 2.000.000 | |
| | Reviu Laporan Kinerja | Kutai Timur | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 68 Laporan | 2.400.000 | Reviu Laporan Kinerja | Kutai Timur | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 68 Laporan | 2.400.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|-------------|--|----------------|-------------------------|---|-------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Reviu Laporan Keuangan | Kutai Timur | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 118 Laporan | 2.360.000 | Reviu Laporan Keuangan | Kutai Timur | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 118 Laporan | 2.360.000 | |
| | Pengawasan Desa | Kutai Timur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 40 Laporan | 2.269.499 | Pengawasan Desa | Kutai Timur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 40 Laporan | 2.269.499 | |
| | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Kutai Timur | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 2 Dok | 2.000.000 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Kutai Timur | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 2 Dok | 2.000.000 | |
| Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | |
| | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Kutai Timur | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 20 Laporan | 2.000.000 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Kutai Timur | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 20 Laporan | 2.000.000 | |
| | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Kutai Timur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 15 Laporan | 1.500.000 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Kutai Timur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 15 Laporan | 1.500.000 | |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--|--|-------------|---|---------------------|-------------------------|--|-------------|---|---------------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan | | | | | | | | | | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Kutai Timur | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 4 Rekomendasi | 800.000 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Kutai Timur | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 4 Rekomendasi | 800.000 | |
| Pendampingan dan Asistensi | | | | | | | | | | | |
| | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Kutai Timur | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 53 perangkat daerah | 700.000 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Kutai Timur | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 53 perangkat daerah | 700.000 | |
| | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 53 perangkat daerah | 750.000 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 53 perangkat daerah | 750.000 | |
| | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi | Kutai Timur | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta | 20 Kegiatan | 2.500.000 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan | Kutai Timur | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta | 20 Kegiatan | 2.500.000 | |

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|--------|--|---------------------|-------------------------|---|--------|--|---------------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | dan Pemberantasan Korupsi | | Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | |
| | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 57 perangkat daerah | 1.709.924 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 57 perangkat daerah | 1.709.924 | |
| | | | | | | | | | | | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 tidak terlepas dari arah dan kebijakan pembangunan nasional, khususnya kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan nasional tersebut menjadi acuan dalam perumusan tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan pengawasan di daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Kebijakan nasional di bidang pengawasan diarahkan pada penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini sejalan dengan kebijakan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen risiko, serta peningkatan kapabilitas APIP.

Selain itu, kebijakan nasional juga menekankan pentingnya pengawasan berbasis risiko (riskbased audit), peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan, serta penguatan fungsi APIP sebagai penjamin mutu (quality assurance) dan pemberi konsultasi (consulting) bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Dengan memperhatikan kebijakan nasional tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam Renja Tahun 2026 mengarahkan pelaksanaan pengawasan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dan daerah, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 dirumuskan sebagai arah yang ingin dicapai dalam pelaksanaan fungsi

pengawasan internal pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Perumusan tujuan ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029 dan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 adalah:

Meningkatkan kualitas pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan tersebut diarahkan untuk memperkuat peran APIP dalam mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur menetapkan sasaran Renja Tahun 2026 sebagai berikut:

1. **Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan**, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan program/kegiatan;
2. **Meningkatnya efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
3. **Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan**, baik hasil pengawasan internal maupun eksternal;
4. **Meningkatnya profesionalisme dan integritas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).**

Sasaran tersebut merupakan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, ditetapkan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.1 Program

Program Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 meliputi:

1. **Program Penyelenggaraan Pengawasan**, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
2. **Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Pencegahan Korupsi**, yang diarahkan untuk memperkuat penerapan SPIP, manajemen risiko, serta upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, yang bertujuan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

3.3.2 Kegiatan

Sebagai penjabaran dari program tersebut, kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 antara lain:

- Pelaksanaan audit kinerja dan audit kepatuhan;
- Reviu laporan keuangan dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- Evaluasi SPIP dan Reformasi Birokrasi;
- Penanganan pengaduan masyarakat;
- Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- Pembinaan dan peningkatan kapasitas APIP;
- Pengelolaan administrasi dan kegiatan penunjang pengawasan.

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan berbasis risiko untuk memastikan pengawasan yang efektif serta memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

TABEL KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, TARGET, PROGRAM DAN KEGIATAN

INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

1. Tujuan dan Sasaran

| Tujuan | Sasaran |
|---|--|
| Meningkatkan kualitas pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1. Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan |
| | 2. Meningkatnya efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah |
| | 3. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan |
| | 4. Meningkatnya profesionalisme dan integritas APIP |

2. Tabel Indikator, Target, Program dan Kegiatan

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target 2026* | Program | Kegiatan |
|---|--|-------------------------------|---|--|
| Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan | Persentase perangkat daerah yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | ≥ 90% | Program Penyelenggaraan Pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> Audit kinerja dan audit kepatuhan Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran |
| Meningkatnya efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah | Nilai/Maturitas SPIP Pemerintah Daerah | Minimal Level 3 (Terdefinisi) | Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Pencegahan Korupsi | <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi SPIP Pembinaan SPIP dan manajemen risiko Evaluasi Reformasi Birokrasi |
| Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan | ≥ 85% | Program Penyelenggaraan Pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Koordinasi tindak lanjut dengan perangkat daerah |
| Meningkatnya profesionalisme dan integritas APIP | Persentase APIP yang memenuhi standar kompetensi | ≥ 80% | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dan pelatihan APIP Sertifikasi jabatan fungsional APIP |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target 2026* | Program | Kegiatan |
|---|--|------------------|---|---|
| Meningkatnya profesionalisme dan integritas APIP | Jumlah kegiatan pembinaan integritas APIP | Sesuai kebutuhan | Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Pencegahan Korupsi | <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan etika dan integritas APIP |
| Terlaksananya fungsi pengawasan secara optimal | Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) | 100% | Program Penyelenggaraan Pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> Audit, reviu, evaluasi, dan pengawasan lainnya |
| Terdukungnya pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat | Persentase dukungan administrasi dan operasional pengawasan | 100% | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan administrasi dan keuangan Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026

Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran operasional dari program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Bab III. Perencanaan ini disusun secara indikatif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta arah kebijakan pengawasan internal pemerintah daerah.

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026, serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029, dengan mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Efisiensi**, yaitu pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan keluaran dan hasil pengawasan yang maksimal;
2. **Efektivitas**, yaitu kesesuaian antara program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran dan tujuan pengawasan yang telah ditetapkan;
3. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengawasan;
4. **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran.

Secara garis besar, rencana kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 mencakup pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan, program peningkatan sistem pengendalian intern dan pencegahan korupsi, serta program penunjang urusan pemerintahan

daerah. Program dan kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pembinaan, serta peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pendanaan setiap program dan kegiatan direncanakan secara proporsional sesuai dengan tingkat prioritas dan kebutuhan, serta diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan berbasis risiko (riskbased audit). Dalam pelaksanaannya, rencana kerja dan pendanaan ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026, dan diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Dengan adanya rencana kerja dan pendanaan yang terencana dan terukur, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 dapat berjalan secara optimal serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Sebagai langkah nyata dalam usaha pencapaian sasaran dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud Inspektorat Kabupaten Kutai Timur direncanakan kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai berikut :

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | PAGU INDIKATIF |
|----|---|---|--------|---------|------------------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan Inspektorat | | | 22.338.303.647,- |
| | a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 | Dokumen | 609.830.220,- |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | PAGU INDIKATIF |
|-----------|---|--|----------|-----------------|-------------------------|
| a.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 | Dok | 209.830.220,- |
| a.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 | Laporan | 200.000.000,- |
| a.3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | 3 | Dok | 200.000.000,- |
| b. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Laporan | 15.304.473.427,- |
| b.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 135 | Orang/ Bulan | 14.929.473.427,- |
| b.2 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 4 | Dokumen | 250.000.000,- |
| b.3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD / Semesteran SKPD | 1 | Laporan | 125.000.000,- |
| c. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1 | Dokumen | 150.000.000,- |
| c.1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 | Laporan | 150.000.000,- |
| d. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 | Laporan | 3.190.000.000,- |
| d.1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 2 | Unit | 190.000.000,- |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | PAGU INDIKATIF | |
|----|-------------------------------|--|--|----------|----------------|----------------------|
| | d.2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 250 | Orang | 3.000.000.000,- |
| | e. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 | Laporan | 1.050.000.000 |
| | e.1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 15 | Paket | 300.000.000,- |
| | e.2 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 160 | Laporan | 750.000.000,- |
| | f. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 | Dokumen | 784.000.000,- |
| | f.1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 10 | unit | 684.000.000,- |
| | f.2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 30 | unit | 100.000.000,- |
| | g | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 | Laporan | 600.000.000,- |
| | g.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | Laporan | 300.000.000,- |
| | g.2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Laporan | 300.000.000,- |
| | h | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 | Laporan | 650.000.000,- |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | PAGU INDIKATIF |
|----------|--|--|--|--------------|----------|-------------------------|
| | h.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 50 | unit | 350.000.000,- |
| | h.2 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 100 | unit | 300.000.000,- |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | | Persentase tindak lanjut temuan | 88.20 | % | 15.150.000.000,- |
| | a. | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Internal | 350 | Laporan | 12.650.000.000,- |
| | a.1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 150 | Laporan | 2.000.000.000,- |
| | a.2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 53 | Laporan | 2.000.000.000,- |
| | a.3 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 200 | Laporan | 2.400.000.000,- |
| | a.4 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 53 | Laporan | 2.360.000.000,- |
| | a.5 | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 139 | Laporan | 2.390.000.000,- |
| | a.6 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 2 | Dok | 1.500.000.000,- |
| | b. | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 35 | Laporan | 2.500.000.000,- |
| | b.1 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 20 | Laporan | 1.000.000.000,- |
| | b.2 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 15 | Laporan | 1.500.000.000,- |
| 3 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | | Persentase Maturitas SPIP SKPD Level 3 | 55 | % | 2.800.000.000,- |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | PAGU INDIKATIF | |
|----|-------------------------------|---|---|----------|------------------|-------------------------|
| | a. | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 4 | Rekomen dasi | 600.000.000,- |
| | a.1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 4 | Rekomen dasi | 600.000.000,- |
| | b. | Pendampingan dan Asistensi | Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendampingan dan asistensi | 8 | Laporan | 2.200.000.000,- |
| | b.1 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 53 | Perangkat Daerah | 500.000.000,- |
| | b.2 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 53 | Perangkat Daerah | 500.000.000,- |
| | b.3 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 20 | Kegiatan | 700.000.000,- |
| | b.4 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 57 | Perangkat Daerah | 500.000.000,- |
| | | TOTAL | | | | 40.288.303.647,- |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat operasional dan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Renja ini disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029 serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Melalui pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, diharapkan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah semakin meningkat, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun tindak lanjut hasil pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berbasis risiko diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kinerja.

Renja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 juga menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pengawasan. Oleh karena itu, pelaksanaannya akan dievaluasi secara berkala untuk menilai tingkat pencapaian sasaran dan efektivitas program serta kegiatan yang telah direncanakan. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan perencanaan pada tahun berjalan maupun pada perencanaan tahun berikutnya.

Renja ini bersifat dinamis dan terbuka terhadap penyesuaian, apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah, kondisi keuangan daerah, maupun kebutuhan pembangunan daerah yang memerlukan penyesuaian arah dan prioritas pengawasan. Dengan dukungan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, diharapkan Renja Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata

dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sangatta, 2025

Plt. Inspektur

Kabupaten Kutai Timur

Dr. Drs. H. Sudirman Latif, SH., M.Si

NIP. 19651212 200003 1 003